

ABSTRAK

Sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia baik lewat DPRD maupun secara langsung, kedua sistem tersebut terdapat kelebihan dan kekurangan sehingga perlu diadakan penelitian lebih jauh. Oleh karena itu penulis mengambil judul studi Perbandingan Pemilihan Kepala Daerah yang pernah dilaksanakan di Indonesia antara sistem Demokrasi Perwakilan berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 dengan Demokrasi Langsung berdasarkan UU No. 12 Tahun 2008 perubahan kedua atas UU No. 32 tahun 2004.

Permasalahan dari tesis ini adalah bagaimanakah pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yang pernah dilaksanakan di Indonesia antara sistem Demokrasi Perwakilan berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 dengan Demokrasi Langsung berdasarkan UU No. 12 Tahun 2008 perubahan kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 serta hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam proses pelaksanaan pilkada dan apa solusinya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber hukum yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yang kemudian data-data tersebut di analisis agar rumusan masalah bisa terjawab.

Hasil penelitian menunjukan bahwa pilkada antara sistem demokrasi perwakilan dan demokrasi langsung mempunyai perbedaan Sistem pemilihan kepala daerah, Panitia pelaksana pilkada, calon perseorangan atau non partai, Pertanggung jawaban kepala daerah, Ketergantungan kepala daerah terhadap DPRD, Ketenaran calon kepala daerah, legitimasi kepala daerah, dan Penguatan demokrasi lokal. Persamaan Sama-sama demokrasi, kepala daerah mempunyai masa jabatan lima (5) tahun dan bisa mencalonkan kembali, Sama-sama mekanisme pemilihan, Masing-masing calon kepala daerah dan wakil kepala daerah diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik, persyaratan calon yang sama, Ada putusan setelah pemilihan, maksudnya ada penetapan, pelantikan pasangan calon yang menang dalam pilkada, dan Pelanggaran yang terjadi sama-sama mencedera demokrasi. Hambatan dan solusi yang dihadapi dalam pilkada lewat DPRD: calon yang diusulkan partai politik, konflik sosial, politik uang, melahirkan sistem kekuasaan oligarki, KDH terpilih hasil kesepakatan partai politik, solusi untuk hambatan yang terdapat dalam pilkada lewat DPRD adalah setiap bakal calon kepala daerah harus mengikuti uji publik. Hambatan dan solusi pilkada langsung: Proses pencalonan yang bermasalah, berkaitan dengan manipulasi dalam perhitungan suara-suara dan penetapan calon yang terpilih, DPT yang tidak akurat, Banyaknya masyarakat yang golput, Konflik Horizontal, dan permasalahan pada saat kampaye, Solusi untuk hambatan dalam pilkada langsung adalah pemerintah harus membuat regulasi hukum yang disertai dengan sanksi yang jelas dan tegas kepada setiap pelanggaran baik saat kampaye maupun kepada mereka yang membeli suara rakyat untuk memuluskan langkah mereka untuk menjadi KDH.

Kata Kunci: Perbandingan, Pilkada, Sistem Demokrasi.

ABSTRACT

System of local elections in Indonesia either through the House of Representatives as well as directly, these two systems are the advantages and disadvantages that need to be conducted further research. Therefore, the authors take the title Comparative study of local elections ever held in Indonesia between the system of representative democracy is based on Law No. 22, 1999 with Direct Democracy by Law No. 12 In 2008 the second amendment of Law No. 32 2004.

Problems of this thesis is how the implementation of local elections ever held in Indonesia between representative democracy system based on Law No. 22, 1999 with Direct Democracy by Law No. 12 In 2008 the second amendment of Law No. 32 of 2004 and any obstacles encountered in the implementation process of the election and what is the solution

This study uses normative juridical approach. Studied only legal source material library or secondary data, which includes the primary legal materials, secondary and tertiary, and then the data in the analysis so that the formulation of the problem could be missed.

The results showed that the election between the system of representative democracy and direct democracy system has different local elections, the committee members of the election, independent candidates or non-party, Accountability kepalah local, regional head of the dependence of the Legislative Council, the regional head of Fame candidates, the legitimacy of the head area, and strengthening local democracy. Equally equation of democracy, regional head has a term of five (5) years and can run back, Equally selection mechanism, each candidate for regional head and deputy regional head carried by the political party or coalition of political parties, candidates for the same requirements , There is a verdict after the election, that there is determination, inauguration candidates who won in the elections, and violations that occur equally injure democracy. Obstacles and solutions encountered in the elections through the Regional Representatives Council: candidates proposed political party, social conflict, political money, gave birth to the power system oligarchy, Regional Head elected the agreement of political parties, a solution to the obstacles that are in the elections through the Regional Representatives Council is every prospect of regional heads should follow public testing. Obstacles and solutions direct election: the nomination process is problematic, due to manipulation in the calculation and determination voices selected candidates, the voters list is not accurate, the number of abstentions society, Horizontal Conflicts and problems during campaigns, solutions to obstacles in direct election is that the government must make a legal regulation is accompanied by a clear and unequivocal sanctions for any violation of either the current campaigns and to those who buy the voice of the people to pave their pace to become the Regional Head.

Keywords : Comparison , Election , Democratic System.